



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARIF TOHA**
Jabatan : Inspektur Jenderal
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **BUDI KARYA SUMADI**
Jabatan : Menteri Perhubungan


Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Januari 2024

Pihak Kedua,
Menteri Perhubungan


BUDI KARYA SUMADI

Pihak Pertama,
Inspektur Jenderal


ARIF TOHA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN


NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SP 1	Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah	IKP 1	Dukungan Pengawasan terhadap Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	Persentase	74,00
		IKP 2	Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	Persentase	83,00
SP 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 3	Nilai Area Penguatan Pengawasan Birokrasi Reformasi Kementerian Perhubungan	Nilai	80,00
SP 3	Meningkatnya Layanan Pengawasan	IKP 4	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	Persentase	90,00
		IKP 5	Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	Level	3,00
		IKP 6	Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan	Persentase	82,00

Kegiatan :

Anggaran :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal | Rp 31.876.000.000,00 |
| 2. Pengelolaan Organisasi dan SDM Pengawasan | Rp 5.898.204.000,00 |
| 3. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Pengawasan | Rp 69.671.418.000,00 |
| 4. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Pengawasan | Rp 1.855.200.000,00 |
| 5. Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Pengawasan | Rp 600.000.000,00 |
| 6. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pengawasan | Rp 1.274.000.000,00 |
| 7. Legislasi dan Legitimasi Pengawasan | Rp 1.250.000.000,00 |

Disetujui,
Menteri Perhubungan


BUDI KARYA SUMADI

Jakarta, 19 Januari 2024
Inspektur Jenderal


ARIF TOHA